

ABSTRAKSI

PT. Meratus merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha jasa pelayaran di Indonesia. Badan usaha ini melakukan berbagai kegiatan pelayaran dari mengoperasikan sendiri kapal-kapalnya, dicarterkan, hingga memberikan jasa keagenan kepada kapal asing yang tidak mempunyai cabang di Indonesia serta membantu pemerintah dalam masalah transportasi para transmigran ke daerah lain. Compliance Audit yang dilakukan pada badan usaha ini bertujuan untuk melihat apakah sistem dan prosedur dalam aktivitas pembelian suku cadang telah dilaksanakan seperti yang telah digariskan oleh badan usaha, sehingga auditor dapat memberikan penilaian atas sistem dan prosedur tersebut.

Dalam melakukan pengujian atas sistem dan prosedur pembelian, auditor menerapkan pengujian secara atribut sampling, dengan model stop-or-go sampling. Tingkat kepercayaan (reliability level) yang ditetapkan adalah 95% dengan batas ketelitian maksimum 5%.

Simpulan yang dapat dirangkum setelah dilakukan pemeriksaan, pengamatan dan penyebaran kuesioner adalah sebagai berikut:

1. Badan usaha belum melakukan pemisahan fungsi secara optimal dan pelaksanaan pencatatan sesegera mungkin.
2. Telah ada pemisahan secara tegas antara bagian yang melakukan pembelian dan bagian penerimaan barang, serta dilakukannya pemeriksaan atas transaksi pembelian oleh orang yang independen dengan kegiatan pembelian dan penerimaan barang tersebut.

Setelah melakukan serangkaian langkah-langkah sampling atas sistem dan prosedur pembelian maka dapat dikatakan bahwa sistem pengendalian internal prosedur tersebut cukup efektif. Sedangkan implikasi yang diperkirakan akan terjadi apabila tidak ada perubahan adalah adanya risiko yang besar atas manipulasi-manipulasi yang mungkin akan dilakukan oleh para karyawan.

Dari berbagai macam pengujian yang dilakukan, maka penulis memberikan beberapa rekomendasi yang sekiranya dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk badan usaha. Pertama, badan usaha disarankan untuk melakukan pemisahan fungsi secara optimal untuk mencegah kemungkinan kolusi-kolusi yang akan dilakukan oleh para karyawan. Kedua, menyangkut masalah pencatatan transaksi pembelian kredit sesegera mungkin. Badan usaha disarankan untuk menambah lembar tembusan surat order pembelian agar semua bagian yang terkait dapat melaksanakan fungsinya sesegera mungkin. Ketiga, pemisahan antara bagian pembelian dan penerimaan dinilai amat baik sekali. Oleh karena itu, hendaknya hal tersebut terus dipantau dan ditingkatkan pengawasannya untuk mencegah terjadinya kolusi-kolusi tadi.